



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI KE PROVINSI ACEH
PADA MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 20-22 MEI 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31;
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 4, 5 dan 6 tentang fungsi, wewenang dan tugas DPR RI; Pasal 59 ayat (4) tentang tugas komisi di bidang pengawasan; Pasal 60 ayat (3) huruf f tentang pelaksanaan kunjungan kerja Komisi DPR RI;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. SKB 4 (empat) Menteri Nomor 06/KB/2021, No.1347 Tahun 2021, No.HK.01.08/MENKES/6678/2021, No.443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
8. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 17 Mei 2022.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kunjungan spesifik bidang Pendidikan ke Provinsi Aceh, yaitu untuk melihat secara langsung hasil penyelenggaraan Belajar dari Rumah dan perkembangan persiapan PTM secara terbatas, serta tata kelola penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19, baik dari sisi peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan di Provinsi Aceh.

C. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Aceh pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 terdiri dari Pimpinan dan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat Komisi X DPR RI, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Bagian TVR Parlemen, dan

Bagian Media Cetak dan Media Sosial Sekretariat Jenderal DPR RI. Kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M. (A-185/Fraksi PDI Perjuangan).

D. Metode Kunjungan Kerja

Pertemuan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, dan dihadiri oleh pemangku kepentingan bidang pendidikan di Provinsi Aceh:

1. Pimpinan DPRA.
2. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Aceh
5. Komite Sekolah, Perwakilan Kepala Sekolah (SMA, SMK) Provinsi Aceh.
6. Ketua Majelis Pendidikan Aceh.
7. Organisasi Profesi Pendidikan Provinsi Aceh (PGRI, IGI, MGMP, FSGI).
8. Ketua LLDIKTI Wilayah XIII Aceh.
9. Rektor Universitas Syiah Kuala.
10. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi data dan Informasi

1. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, bahwa kualitas pendidikan di Provinsi Aceh meningkat. Hal ini antara lain ditunjukkan melalui hasil pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2022, dimana Provinsi Aceh menempati posisi lima besar secara nasional dari jumlah para siswa/i lulusan SMA dan SMK yang diterima di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri.
2. Berdasarkan data yang dikeluarkan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT), jumlah siswa/i SMA dan SMK dari Provinsi Aceh yang terdaftar pada SNMPTN tahun 2022 mencapai 14.768 orang dan yang diterima mencapai 5.793 orang. Jumlah ini, apabila dibandingkan dengan jumlah siswa/i yang lolos pada tahun 2021 yang hanya 5.626 orang, terjadi peningkatan sebanyak 167 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan 17.807 orang, dan peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan 11.929 orang, serta Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ketiga dengan 9.762 orang. Sementara posisi keempat ditempati Sumatera Utara dengan 8.776 orang, dan Provinsi Aceh menempati rangking kelima dengan 5.793 orang.
3. Untuk kategori rasio persentase penerimaan, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di pulau Sumatera yang berhasil masuk pada rangking 10 besar secara nasional. Dengan rasio penerimaan 39,23%, Aceh berhasil menjadi jawara di pulau Sumatera, mengungguli pesaing terdekatnya yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang mencatat rasio penerimaan 32,13%. Untuk kategori ini, Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat ke 13 secara nasional.

Sedangkan Aceh menempati posisi ke 6. Sementara Provinsi Sumatera Utara, meskipun meraih posisi ke 4 pada penerimaan jumlah siswa yang lulus, namun nilai rasio penerimaannya hanya 18,76 %, jauh tertinggal di bawah Aceh, sehingga menempati posisi ke 26 secara nasional.

4. Dalam konteks pendidikan, Rektor Unsyiah menyampaikan bahwa Unsyiah memiliki program untuk merekrut calon guru atau program talenta calon guru, yang berasal dari para aktivis atau lulusan pesantren dan sebagainya. Dalam rekrutmen ini, diutamakan mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Program ini, awalnya ditargetkan sejumlah 100 calon guru, dan sementara akan difasilitasi antara lain biaya SPP.
5. Rektor Unsyiah juga menyampaikan cita-citanya untuk membangun *Sport Science* pada jurusan olahraga. Terutama dikembangkan untuk mendukung PON 2024 di Aceh. Dalam proposal yang telah disusun, Unsyiah telah menyiapkan 1800 hektar wilayah yang dikhususkan untuk membangun fasilitas tersebut. Dalam kesempatan kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ini, Rektor Unsyiah mengharapkan dukungan Komisi X untuk mewujudkan hal ini, dimana fasilitas ini akan digunakan oleh Unsyiah pasca ajang PON 2024.
6. Tokoh Pendidikan Aceh yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Arraniry menyampaikan beberapa hal terkait Pendidikan antara lain bawa di Aceh ada Majelis Pendidikan Aceh (*Aceh Education Council*), yang menjadi cikal bakal Dewan Pendidikan di Aceh. Komite Sekolah juga terbentuk melalui lembaga-lembaga ini. Di Aceh, pendidikan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA) yang didukung oleh *Program Support Education Development in Aceh* (SEDIA) dan *Program ACDP Education Policy Reseach in Aceh* (EPRA). Tim ini berkoordinasi untuk memajukan pendidikan di Aceh yang berasal dari berbagai lembaga. Pendidikan adalah program penggerak pendidikan, maka asas yang dipakai adalah asas keislaman, keacehan, keindonesiaan dan keuniversalan. Utamanya adalah penguatan pendidikan keislaman. Hal ini diatur dalam berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan berbagai program pendidikan yang berasaskan hal-hal tersebut.
7. Disampaikan juga oleh tokoh Pendidikan Aceh, bahwa Aceh adalah wilayah khusus, terutama terkait pengembangan pendidikan, agama dan sosial budaya, yang diperkuat dalam regulasi Aceh. Aceh memiliki konsep yang dikembangkan berdasar nilai Islam. Dari sisi anggaran, Aceh mengalokasikan 21,95% untuk pendidikan. Namun ini banyak terserap untuk gaji guru dan sebagainya. Rasio guru di SMP sekitar 1:10, rasio guru SMA 1:11, dan rasio guru SD 1:20. Guru ini perlu diperkuat, terutama penguatan bidang ekonomi dan kesejahteraan. Penguatan Pendidikan Guru juga perlu dilakukan. Para siswa perlu didukung KIP agar tingkat pendidikannya dapat

meningkat. Di Aceh, banyak kampus perguruan tinggi yang masih berakreditasi C, harapannya menjadi B dan A.

B. Permasalahan dan Temuan

Dalam kunjungan kerja ini, tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI menemukan beberapa permasalahan, antara lain:

1. Terdapat kesulitan dalam mengejar target Program Kampus Merdeka, meskipun sudah diturunkan jumlah mahasiswa peserta program ini dari 30% mahasiswa menjadi 20% mahasiswa. Hal ini dikarenakan di Aceh memiliki keterbatasan tempat (perusahaan) yang dapat menerima anak magang, sehingga Universitas Syiah Kuala melaksanakan program mandiri. Selain itu, BUMN yang berada di Aceh belum bisa menampung semua mahasiswa yang melaksanakan program Kampus Merdeka dan hanya dapat mendukung program tersebut paling lama dua bulan.
2. Lulusan Unsyiah secara umum tidak lebih dari 40% yang bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Adapun sisanya, sekitar 60% inilah yang harus disiapkan agar bekerja sesuai dengan bidangnya. Perlu dukungan agar para mahasiswa yang belum bekerja sesuai bidang ini tetap dapat bekerja sesuai dengan bidangnya, termasuk mahasiswa yang berwirausaha.
3. Jumlah anggaran maupun penerima KIP Kuliah di Universitas Syiah Kuala menurun tahun 2022 ini mengalami penurunan yaitu hanya 1600. sementara tahun 2021 mendapatkan 1800 lebih penerima KIP Kuliah. Oleh karena itu, alokasi penerima KIP Kuliah ini agar dinaikan.
4. Selama 4 (empat) tahun terakhir tidak ada lagi dosen negeri di perguruan tinggi swasta. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran di perguruan tinggi swasta, termasuk berdampak terhadap kualitas.
5. Adanya kesenjangan dalam pengelolaan Pendidikan di Aceh, dimana banyak SDM yang bagus namun mereka diambil oleh pihak luar atau bekerja di daerah luar, sehingga Aceh malah tidak diurus oleh sumberdayanya sendiri. Bahkan beasiswa yang dikeluarkan untuk putra-putra Aceh bisa dikatakan hilang. Oleh karena itu, perlu komitmen yang kuat sehingga pengelolaan sumberdaya Aceh yang berawal dan berujung untuk Aceh. Permasalahan ini disampaikan oleh ketua PGRI Aceh. Selain itu, permasalahan yang disampaikan oleh PGRI adalah mengenai belum semua Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan dengan baik. Dalam hal kebijakan, pengurus PGRI juga menyampaikan permasalahan mengenai adanya disparitas regulasi yang berkembang, misalnya keberpihakan kebijakan untuk daerah terpencil yang kurang merata, sehingga perlu keberpihakan kebijakan bagi pelaku pendidikan di daerah terpencil di Provinsi Aceh.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik pendidikan di Provinsi Aceh ini, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun organisasi/lembaga pendidikan, terdapat beberapa hal yang menjadi

catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan tanggapan dari pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Aceh, antara lain:

1. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Aceh yang hadir mewakili Kemendikbudristek RI menyampaikan: **a)** saat ini LPMP telah berubah menjadi BPMP dengan ruang dan tanggungjawab kinerjanya makin luas. Dana BOS, regular, dan dana lainnya menjadi tanggungjawab BPMP, termasuk advokasi dalam penjaminan mutu pendidikan. Sementara Diklat hingga diskusi pengembangan sumberdaya pendidikan untuk guru ada pada BGP (Balai Guru Penggerak); **b)** Dalam Rakortek, terdapat 8 kabupaten/kota belum mengisi secara lengkap data dan kebutuhan sekolah, sementara 4 kabupaten/kota lainnya belum mengisi sama sekali; **c)** penggunaan platform pembelajaran di Provinsi Aceh masih rendah. Mengenai beberapa permasalahan tersebut, Kepala BPMP Provinsi Aceh telah mencatat serta akan menindaklanjuti dan mengoordinasikannya dengan pejabat terkait di Kemendikbudristek RI terhadap masukan dan pandangan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh.
2. Anggota DPRD Provinsi Aceh, minta agar dana Otonomi Khusus Aceh bagi aceh diberikan selama-lamanya kepada aceh. Hal ini diperlukan untuk kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Aceh.
3. Ketua LLDIKTI Wilayah XIII Aceh, Prof Faisal Rani, SH MHum. Menyampaikan antara lain: **a)** LLDIKTI kini bukan hanya bertanggungjawab terhadap PTS namun juga terhadap PTN. Ijin pembukaan Prodi baru baik di PTN maupun PTS saat ini harus melalui LLDIKTI. Bahkan di UIN, jika akan membuka Prodi umum, juga harus melalui LLDIKTI. Jumlah PTS jauh lebih banyak dibanding PTN. Dengan jumlah PTS yang lebih banyak, maka KIP Kuliah, seharusnya lebih banyak diberikan kepada PTS; **b)** Pembukaan Perguruan Tinggi vokasi memang membutuhkan biaya mahal karena harus dilengkapi dengan laboratorium dan ruang praktek yang mahal. Masyarakat cenderung enggan membuka sekolah vokasi. Saat ini kebijakan Pemerintah adalah mengembangkan pendidikan vokasi yang berbasis sumber daya alam lokal. Di Aceh, khususnya di daerah Simelue, oleh masyarakat setempat telah dikembangkan sekolah vokasi (politeknik) perikanan karena daerah tersebut merupakan daerah nelayan. Namun karena minimnya anggaran, maka sekolah yang sangat penting ini tidak bisa maksimal. Politeknik di Simelue saat ini membutuhkan laboratorium yang memadai.
4. Ketua PGRI Provinsi Aceh menyampaikan bahwa saat ini ada disparitas regulasi yang melahirkan ketimpangan penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T. Mengenai hal ini, PGRI Provinsi Aceh mengharapkan ada regulasi yang jelas dan berpihak kepada daerah

3T, artinya jika ada bantuan dari pusat maka harus diperjelas peruntukannya.

5. Tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan di Aceh atas penjelasan mengenai kondisi Pendidikan di Aceh. Beberapa masukan akan menjadi catatan bagi Komisi X DPR RI. Beberapa hal yang dapat ditanggapi, antara lain:
 - a. Terkait guru di daerah terpencil telah menjadi komitmen kami di Komisi X DPR RI, dan telah ada tunjangan bagi guru di daerah terpencil. Akan tetapi data daerah terpencil perlu diperbaiki, karena data dan informasi ini tidak merata dan ada informasi bahwa telah ada tunjangan bagi guru terpencil namun infrastruktur pendidikan lainnya ternyata masih sangat minim. Selain itu, data ini kadang juga disembunyikan oleh pejabat (kecamatan), karena data yang menunjukkan ketertinggalan ini menunjukkan kegagalan kerja mereka (pejabat tersebut). Daerah yang lain juga mengalami hal yang sama.
 - b. Terkait KIP khusus untuk pembinaan guru, tentu akan kami dukung. Kami di Komisi X DPR RI juga mengapresiasi program talenta calon guru. Mengenai pengangkatan guru saat ini memang terkendala mengenai anggaran dan juga regulasi karena saat ini yang ada adalah rekrutmen guru PPPK. Selain itu, ada juga kesenjangan anggaran untuk guru di kementerian pendidikan dan kementerian agama. Namun ada info pembahasan anggaran pendidikan untuk RAPBN 2023 mendatang. Komisi X DPR RI perlu mendapatkan data tertulis, dengan surat, sehingga dalam berbagai permasalahannya dapat disampaikan dengan rinci dan lebih jelas. Data inilah yang menjadi bahan bagi kami Komisi X DPR RI untuk menyampaikannya kepada Pemerintah khususnya kepada Mendikbudristek RI.
 - c. Mengenai pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebenarnya belum sepenuhnya kami setuju karena kebijakan tersebut belum ada naskah akademiknya.
 - d. Mengenai politik anggaran Pendidikan, di Indonesia dan luar negeri nampaknya terdapat perbedaan, dimana di Indonesia anggaran pendidikan merupakan kewajiban sementara di luar negeri anggaran Pendidikan merupakan investasi.
 - e. Dapat dipahami jika di Provinsi Aceh ini membutuhkan KIP Kuliah yang cukup banyak, dan Aceh juga membutuhkan stimulan khusus untuk pendidikan.

D. Usulan dan Aspirasi

Selama melakukan kunjungan dan peninjauan lapangan terdapat usulan dan aspirasi yang disampaikan para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh, antara lain:

1. Unsyiah mengusulkan adanya dukungan untuk membangun *Sport Science* yang akan dikembangkan untuk mendukung PON 2024 di Aceh. Unsyiah dalam proposalnya telah menyiapkan 1800 hektar wilayah yang dikhususkan untuk membangun fasilitas tersebut.

Mohon dukungan Komisi X untuk mewujudkan hal ini. Fasilitas ini akan mencontoh Jepang, dan akan digunakan oleh Unsyiah pasca digunakan untuk PON 2024.

2. Kepala sekolah SDN 1 Banda Aceh mengusulkan penambahan guru, karena saat ini hanya ada 6 guru. Hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
3. Perwakilan dari Komite Sekolah menyampaikan dalam rangka peningkatan mutu sekolah, diusulkan agar standar biaya BOS ditingkatkan dan dalam PPDB agar ada jalur undangan.
4. Perwakilan tokoh pendidikan Aceh mengusulkan agar ada keberpihakan untuk perguruan tinggi swasta, seperti bantuan untuk perguruan tinggi swasta ditingkatkan, termasuk bantuan sarpras, laboratorium, dan penambahan KIP Kuliah.
5. Politeknik Perikanan di Simeleu mengusulkan adanya bantuan laboratorium yang lebih memadai.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dari pertemuan dan yang telah dilakukan, tim kunjungan kerja dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan terakhir, khususnya tahun 2022, kualitas pendidikan di Provinsi Aceh mengalami peningkatan. Hal ini antara lain ditunjukkan dari hasil pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2022, dimana Provinsi Aceh menempati posisi lima besar secara nasional. Bahkan untuk kategori rasio persentase penerimaan di perguruan tinggi negeri, Provinsi Aceh merupakan satu-satunya provinsi di pulau Sumatera yang berhasil masuk pada ranking 10 besar secara nasional.
2. Pelaksanaan program Kemendikbudristek RI dalam bentuk pembelajaran Tatap Muka (PTM) telah dilaksanakan baik untuk jenjang Pendidikan menengah maupun Pendidikan tinggi di Provinsi Aceh secara umum berjalan baik. Adapun permasalahan yang mengemuka yaitu kurangnya guru di beberapa satuan Pendidikan untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
3. Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar dengan program turunannya terdapat kesulitan meskipun sudah diturunkan jumlah mahasiswa peserta program ini dari 30% mahasiswa menjadi 20% mahasiswa, hal ini dikarenakan di Aceh memiliki keterbatasan tempat (perusahaan) yang dapat menerima anak magang. Lulusan Unsyiah secara umum tidak lebih dari 40% yang bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Sekitar 60% inilah yang harus disiapkan agar bekerja sesuai dengan bidangnya. Perlu dukungan agar para mahasiswa yang belum bekerja sesuai bidang ini tetap dapat bekerja sesuai dengan bidangnya, termasuk mahasiswa yang berwirausaha.
4. Jumlah alokasi dan anggaran PIP dan KIP Kuliah untuk Provinsi Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan dari jumlah siswa dan mahasiswa yang ada di Aceh. Sebagai contoh, KIP Universitas Syiah Kuala tahun 2022 ini menurun dibandingkan tahun 2021, dimana sebelumnya 1800 lebih penerima KIP Kuliah, namun saat ini hanya 1600 penerima KIP Kuliah.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek RI dan Pemprov Aceh untuk menindaklanjuti permasalahan pendidikan di Provinsi Aceh antara lain terkait implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), permasalahan kebutuhan dosen negeri untuk perguruan tinggi swasta, dan permasalahan kesenjangan pendidikan di beberapa wilayah di Aceh
2. Di Bidang Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan alokasi jumlah dan anggaran KIP Kuliah, termasuk untuk Provinsi Aceh.
3. Komisi X DPR RI mendorong pemerintah untuk mendukung Unsyiah dalam upaya pembangunan *Sport Science* yang dikembangkan untuk mendukung PON 2024 di Aceh dan pengembangan Prodi Olahraga.

V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Aceh disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 22 Mei 2022

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

Ttd.

**Agustina Wilujeng P., S.S., M.M.
A-185**